

EFEKTIVITAS BELANJA URUSAN PENDIDIKAN KESEHATAN DAN SOSIAL UNTUK MENURUNKAN ANGKA KEMISKINAN DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Margareta Patricia Mardianus
NPP. 31.0791

Asdaf Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Program Studi Keuangan Publik
Email: pciamrgt27@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Marja Sinurat, M.Pd. MM

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): One of the policy measures that can be taken by the government to improve people's welfare and lead them to freedom from poverty is through government spending. Looking at the realization of expenditure on education, health, and social affairs in the previous table, expenditure on education and health functions during the 2021-2023 period experienced a downward trend compared to previous years. This indicates that there is still a lack of government effectiveness in realizing expenditures so that expenditure realization has not reached 100%. **Purpose:** This study aims to analyze the effectiveness of expenditure on education, health, and social affairs to reduce poverty in West Manggarai Regency, the inhibiting factors and efforts made to increase the effectiveness of expenditure on education, health, and social affairs to reduce poverty in West Manggarai Regency. **Method:** This study used a qualitative approach and descriptive method. This research evaluates three dimensions of effectiveness, namely, goal achievement, integration, and adaptation, with reference to Duncan's (1973) theory in Steers (1985:53). Data collection was conducted through structured interview techniques, observation, and documentation. **Result:** The results showed that education expenditure was not effective because it was not on target where the realization of activities to provide personnel costs for PAUD and equivalency students had not reached the target, health expenditure was not effective because it did not meet the target indicators where the realization of pregnant women who received maternal health services did not meet the target, and social expenditure was not effective because it did not respond well where it only relied on programs from the central government and there was no program initiation from the agency as an effort to reduce poverty in West Manggarai Regency **Conclusion:** Thus it can be concluded that efforts to reduce poverty in West Manggarai Regency, through expenditure on education, health and social affairs, have not been carried out effectively.

Keywords: Expenditure Effectiveness, Poverty, Goal Achievement, Government Affairs

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Salah satu langkah kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengarahkan mereka menuju kebebasan dari kemiskinan adalah dengan melakukan belanja pemerintah. Melihat dari realisasi belanja urusan pendidikan, kesehatan, serta sosial pada tabel sebelumnya, belanja fungsi pendidikan dan kesehatan selama kurun waktu 2021-2023 mengalami tren penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun

sebelumnya. Hal ini mengindikasikan masih kurangnya efektivitas pemerintah dalam merealisasikan belanja sehingga realisasi belanja belum mencapai angka 100%. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas belanja urusan pendidikan, kesehatan, dan sosial untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Manggarai Barat, faktor penghambat dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas belanja urusan pendidikan, kesehatan, dan sosial untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Manggarai Barat. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Penelitian ini mengevaluasi tiga dimensi efektivitas yaitu, pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi, dengan merujuk pada teori Duncan (1973) dalam Steers (1985:53). Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara terstruktur, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan :** Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja urusan pendidikan belum efektif karena belum tepat sasaran dimana realisasi kegiatan penyediaan biaya personil peserta didik PAUD dan kesetaraan belum mencapai target, belanja urusan kesehatan belum efektif karena belum memenuhi indikator tepat sasaran dimana realisasi ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil tidak sesuai target, dan belanja urusan sosial belum efektif karena belum merespons dengan baik dimana hanya mengandalkan program dari pusat dan belum ada inisiasi program dari dinas sebagai upaya untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Manggarai Barat. **Kesimpulan:** Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa upaya untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Manggarai Barat, melalui belanja urusan pendidikan, kesehatan dan sosial belum terlaksana secara efektif.

Kata kunci: Efektivitas Belanja, Kemiskinan, Pencapaian Tujuan, Urusan Pemerintahan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

No Poverty merupakan poin pertama dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang merupakan agenda pembangunan global yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia secara universal. Kemiskinan mencakup ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Keterbelakangan dan keteringgalan dalam pengembangan sumber daya manusia, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan produktivitas yang rendah. Presentase kemiskinan Kabupaten Manggarai Barat mencapai 17,15% yang berarti sebanyak 49.947 orang dari 259.566 penduduk Manggarai Barat masuk dalam kategori penduduk miskin. Meski ibu kota Kabupaten Manggarai Barat yaitu Labuan Bajo telah dijadikan kota destinasi pariwisata super premium, faktanya masih memiliki puluhan ribu penduduk miskin.

Kondisi kemiskinan yang cukup tinggi tentu menjadi tantangan serius bagi pemerintah dalam menjalankan otonomi daerah dimana daerah harus memastikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya otonomi daerah, terjadi desentralisasi dalam pengelolaan keuangan daerah, perencanaan ekonomi, termasuk penyusunan program-program pembangunan daerah, serta perencanaan lainnya yang dipindahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sebagai bentuk kebijakan fiskal, pemerintah pusat setiap tahun menetapkan APBN dan APBD dimana nantinya menjadi instrumen utama yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Menurut Yao (2007) dalam (Pasaribu, 2016)

terdapat beragam jenis pengeluaran yang dapat digunakan untuk membantu kelompok masyarakat miskin dengan tujuan untuk mengurangi atau bahkan mengatasi tantangan yang dihadapi mereka. Pengeluaran ini dikenal sebagai pengeluaran sosial yang pro-miskin (*pro-poor social expenditure*). Jenis pengeluaran yang termasuk dalam kategori ini meliputi pengeluaran yang terkait dengan pelayanan dasar, seperti pendidikan dasar, layanan kesehatan primer, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta pembangunan infrastruktur jalan di pedesaan. Hal ini selaras (Carolina, 2022) yang menyatakan pengeluaran krusial yang terkait dengan pengentasan kemiskinan meliputi sektor subsidi, pendidikan, dan kesehatan. Penggunaan anggaran belanja yang telah disusun dalam APBD tersebut hendaknya dilakukan secara efektif. Pada intinya, efektivitas berkaitan dengan mencapai tujuan atau target yang ditetapkan. Berikut disajikan data anggaran dan realisasi belanja urusan pendidikan, kesehatan, dan sosial tahun 2021-2023:

Tabel 1.1
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Urusan Pendidikan Kabupaten Manggarai Barat

Tahun	Pendidikan	
	Anggaran	Realisasi
2021	Rp.264.530.868.828	Rp.255.856.191.798
2022	Rp.297.700.000.000	Rp.278.613.586.200
2023	Rp.308.359.951.671	Rp.298.951.024.864

Sumber: LRA Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat, 2024

Tabel 1.2
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Urusan Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat

Tahun	Kesehatan	
	Anggaran	Realisasi
2021	Rp.150.081.566.476	Rp.136.384.821.143
2022	Rp.127.621.684.493	Rp.118.477.716.000
2023	Rp.190.260.665.163	Rp.170.850.000.000

Sumber: LRA Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, 2024

Tabel 1.3
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Urusan Sosial Kabupaten Manggarai Barat

Tahun	Sosial	
	Anggaran	Realisasi
2021	Rp.4.700.640.300	Rp.4.132.147.850
2022	Rp.4.575.280.244	Rp.4.270.551.203
2023	Rp.5.259.668.773	Rp.4.967.813.094

Sumber: LRA Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Barat, 2024

Salah satu langkah kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengarahkan mereka menuju kebebasan dari kemiskinan adalah dengan melakukan belanja pemerintah. Belanja urusan pendidikan akan meningkatkan akses yang lebih baik ke pendidikan yang akan membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial dimana dengan memberikan pendidikan yang setara kepada semua lapisan masyarakat sebagai dasar untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Belanja urusan kesehatan menjamin akses yang baik ke layanan kesehatan dasar akan berdampak langsung pada produktivitas dimana masyarakat yang lebih sehat lebih mampu bekerja dan berkontribusi pada

pengurangan kemiskinan. Belanja urusan sosial berperan sebagai jaring pengaman sosial untuk membantu masyarakat mengatasi krisis ekonomi atau keadaan darurat yang memicu peningkatan kemiskinan.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Melihat dari realisasi belanja urusan pendidikan, kesehatan, serta sosial pada tabel sebelumnya, belanja fungsi pendidikan dan kesehatan selama kurun waktu 2021-2023 mengalami tren penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan masih kurangnya efektivitas pemerintah dalam merealisasikan belanja sehingga realisasi belanja belum mencapai angka 100%. Realisasi belanja yang tidak efektif akan berdampak pada tidak efektifnya pelaksanaan program termasuk program yang berkaitan langsung dengan penurunan kemiskinan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, diantaranya adalah

Penelitian pertama yakni (Septriani, 2023) yang berjudul Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bengkulu yang menyimpulkan bahwa secara parsial, pengeluaran untuk kesehatan memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan pengeluaran untuk pendidikan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sementara itu, pengeluaran untuk perlindungan sosial tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Secara bersama-sama, pengeluaran untuk kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial memiliki dampak positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Penelitian kedua yakni (Aini, 2020) yang berjudul Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial Pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Dalam penelitian ini diketahui pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan memiliki korelasi negatif, meskipun tidak signifikan, terhadap tingkat kemiskinan. Di sisi lain, pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan dan perlindungan sosial memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Penelitian ketiga yakni (Nourmanita, 2015) yang berjudul Belanja Publik (*Expenditure Assignment*) Antara Masalah dan Efektivitas Anggaran Belanja. Penelitian ini menunjukkan bahwa belanja negara dan daerah di Indonesia belum secara signifikan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu faktornya adalah kurangnya alokasi belanja modal dari pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur yang menghubungkan wilayah antar pulau di Indonesia sementara infrastruktur memainkan peran penting untuk meratakan pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menarik investasi ke daerah di Indonesia.

Penelitian keempat (Kristiyanto & Widodo, 2017) yang berjudul Analisis Efisiensi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Kota di Jawa Timur Dalam Pengentasan Kemiskinan. Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Timur masih belum mencapai tingkat efisiensi 100 persen, sedangkan kota kabupaten yang telah mencapai tingkat efisiensi tersebut masih merupakan minoritas. Analisis mengenai perbedaan status kota atau kabupaten dalam efisiensi belanja, baik langsung maupun tidak langsung, dalam

penanganan masalah kemiskinan menunjukkan bahwa tidak ada jaminan bahwa kota akan lebih efisien dibandingkan dengan kabupaten.

Penelitian kelima (Suartini, 2020) yang berjudul Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Kemiskinan: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini menunjukkan kinerja keuangan di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah tidak signifikan memengaruhi penurunan tingkat kemiskinan di wilayahnya. Hal ini diduga salah satunya disebabkan oleh rendahnya kemampuan pemerintah kabupaten dan kota dalam menggali potensi keuangan daerahnya. Diperlukan peningkatan kreativitas pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan dalam menggali sumber-sumber keuangan daerah, antara lain melalui reformasi di bidang pajak dan retribusi daerah. Selain itu, perlunya pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tengah meningkatkan keberpihakan, khususnya dalam hal anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan.

Penelitian keenam (Putra, 2023) yang berjudul Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pengentasan Kemiskinan pada Provinsi di Indonesia. Hasil uji hipotesis parsial dengan uji t, diketahui variabel pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan belanja pemerintah daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pengentasan kemiskinan. Sedangkan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pengentasan kemiskinan. Hasil uji F, diketahui pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan belanja pemerintah daerah berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pengentasan kemiskinan pada provinsi di Indonesia tahun 2017-2021.

Penelitian ketujuh (Alifa Ramadhani, 2023) yang berjudul Pengeluaran Pemerintah dan Kemiskinan Multidimensi Indonesia Tahun 2018-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah baik pengeluaran pemerintah untuk fungsi perumahan fasilitas umum maupun untuk belanja bantuan sosial berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kemiskinan multidimensi di Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan kepada pemerintah bahwa dalam membuat kebijakan pengeluaran perlu mengkaji lebih luas dampak yang ditimbulkan terhadap kemiskinan multidimensi. Selanjutnya pemerintah perlu mengevaluasi dan mengkaji ulang efektifitas kebijakan yang telah dilakukan untuk penurunan kemiskinan terutama kemiskinan multidimensi, diantaranya dapat dilakukan melalui dekomposisi anggaran berdasarkan program, dengan demikian akan dapat dilihat pengaruh belanja terhadap kemiskinan dengan lebih rinci.

Penelitian kedelapan (Atmawijaya & Santoso, 2024) dengan judul Analisis Peran Belanja Publik Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap Percepatan Penurunan Kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan peran pemerintah yang dituangkan melalui kebijakan *mandatory spending* yakni belanja pendidikan telah tergolong efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan, yang ditunjukkan dengan capaian angka partisipasi murni Jawa Timur yang berada diatas nasional. Namun demikian, peran pemerintah dalam hal belanja kesehatan dinilai belum efektif, sebab belanja kesehatan masih berfokus pada pemerataan kuantitas dan kualitas tingkat dasar bukan terhadap program yang bersifat preventif. Selanjutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama pendidikan, yang didukung dengan alokasi belanja pemerintah tergolong efektif dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di Jawa Timur. Terakhir, permasalahan pengangguran di Jawa Timur tidak memiliki pengaruh langsung terhadap permasalahan kemiskinan yang dikarenakan Sebagian besar masyarakat menganggur di Jawa Timur merupakan pengangguran terdidik.

Penelitian kesembilan (Sandra, 2024) dengan judul Pengaruh Pengeluaran pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Makassar.

Penelitian kesepuluh (Sigit & Kosasih, 2020) dengan judul Pengaruh Dana Desa terhadap Kemiskinan: Studi Tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial bahwa penyaluran dana desa memberikan pengaruh negative terhadap jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Indonesia, variabel lain yang meliputi alokasi Dana Desa dan PDRB juga memiliki pengaruh negative terhadap jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Indonesia, serta variabel belanja modal tidak memiliki pengaruh terhadap jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Indonesia. Adapun aspek yang perlu diperbaiki terkait dengan kebijakan dana desa yaitu penyempurnaan aspek formulasi, aspek penguatan pengawasan, dan aspek peningkatan inovasi dalam penggunaan dana desa.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang menggunakan metode dan teori yang relatif sama dengan penelitian sebelumnya, namun terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu yakni untuk mengetahui serta menganalisis efektivitas anggaran belanja urusan pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar khususnya urusan pendidikan, kesehatan, dan sosial dalam rangka mendukung kegiatan terkait penurunan kemiskinan di Kabupaten Manggarai Barat, dengan menggunakan teori efektivitas Duncan.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas belanja urusan pendidikan, kesehatan, dan sosial untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Manggarai Barat, faktor penghambat dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas belanja urusan pendidikan, kesehatan, dan sosial untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Manggarai Barat.

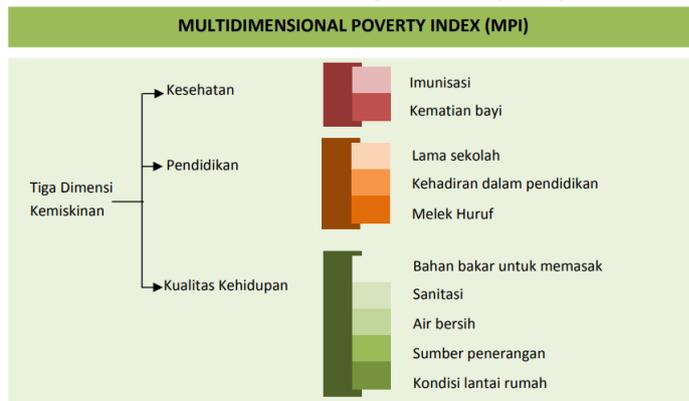
II. METODE

Penelitian kualitatif menurut Creswell (2018) adalah salah satu di mana penyelidik sering membuat klaim pengetahuan berdasarkan terutama pada perspektif konstruktivis. Dalam karya tulis ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif karena dianggap sesuai untuk observasi yang dilakukan. Hal ini disebabkan karena penelitian dilakukan berdasarkan fakta-fakta lapangan tentang efektivitas belanja pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Manggarai Barat. Peneliti menyelidiki fakta-fakta tersebut dan kemudian menguraikan atau menjelaskannya secara sistematis, aktual, dan akurat.

Dalam mengumpulkan data dan informasi dapat dilakukan pada tiga sumber seperti yang dikemukakan oleh Simangunsong (2017:81), yaitu *person*, *place*, dan *paper*. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi yang kemudian dianalisis melalui tahap *data reduction*, *data display*, serta *conclusion drawing* (Simangunsong, 2017:226).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 3.1
Multidimensional Poverty Index (MPI)



Sumber: Oxford Poverty & Human Development Initiative, 2023

Indikator *Multidimensional Poverty Index (MPI)* yang ditampilkan dalam gambar mencakup tiga dimensi utama kemiskinan yaitu, kesehatan, pendidikan, dan kualitas kehidupan. Setiap dimensi memiliki beberapa indikator spesifik yang diukur untuk menilai tingkat kemiskinan secara multidimensi. Indikator kesehatan meliputi imunisasi dan kematian bayi. Dimensi pendidikan mencakup indikator lama sekolah, kehadiran dalam pendidikan, dan melek huruf. Dimensi yang terakhir yaitu dimensi kualitas kehidupan berupa bahan bakar untuk memasak, sanitasi, air bersih, sumber penerangan, dan kondisi lantai rumah. Untuk penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Manggarai Barat, alokasi belanja pemerintah harus difokuskan pada program-program yang langsung berhubungan dengan indikator-indikator MPI tersebut dan selaras dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) karena pada dasarnya berkaitan dengan pelayanan dasar pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3.1 Efektivitas Belanja Urusan Pendidikan Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan di Kabupaten Manggarai Barat

Penyediaan biaya personal peserta didik adalah salah satu komponen penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan. Ini termasuk biaya yang berkaitan dengan kebutuhan dasar siswa seperti seragam, buku pelajaran, alat tulis, dan kebutuhan lainnya yang mendukung proses belajar mengajar. Penyediaan biaya personal peserta didik yang memadai dapat membantu mengurangi hambatan ekonomi yang mungkin dihadapi siswa dalam mengakses pendidikan berkualitas, sehingga meningkatkan partisipasi dan keberhasilan pendidikan serta berpotensi mengurangi tingkat kemiskinan.

3.1.1 Pencapaian Tujuan

a. Tepat Sasaran

Penyediaan biaya personal disediakan untuk tiap jenjang, dari jenjang PAUD hingga sekolah menengah pertama. Penyediaan biaya personal peserta didik untuk jenjang SD dan SMP telah memenuhi target sedangkan untuk penyediaan biaya personal peserta didik jenjang PAUD dan kesetaraan belum mencapai target yang ditetapkan dimana capaian target untuk jenjang PAUD sebesar 98% dari 100% dan target untuk jenjang kesetaraan adalah 76% dari 100%.

b. Tepat Waktu

Gambar 3.2

Mekanisme Pencairan Anggaran Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik



Sumber: data diolah penulis, 2024

Pencairan anggaran penyediaan biaya personil peserta didik dicairkan tepat waktu setelah verifikasi dan evaluasi oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat.

3.1.2 Integrasi

Dalam penyediaan biaya personil peserta didik untuk jenjang PAUD, Kesetaraan, SD, dan SMP, integrasi digunakan untuk melihat sejauhmana berbagai elemen dalam sistem pendidikan bekerja secara sinergis. Koordinasi antar jenjang pendidikan untuk memastikan keselarasan dan kebijakan program sehingga alokasi dan penggunaan anggaran juga dapat diselaraskan. kegiatan penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan untuk setiap jenjang pendidikan dari PAUD hingga SMP yang dimana kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyediaan biaya personil peserta didik berjalan efektif dan mencapai target. Penyiapan evaluasi satuan pendidikan meliputi identifikasi kebutuhan, perencanaan evaluasi, dan pengumpulan data. Setelah penyiapan evaluasi, kemudian dilaksanakan evaluasi dimana kinerja satuan pendidikan dinilai dalam penyediaan biaya personil berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Setelah itu kemudian dilakukan perbaikan dan pengembangan berupa penyesuaian alokasi dana atau peningkatan kapasitas tenaga pendidik.

3.1.3 Adaptasi

Adaptasi mencakup pengenalan, interpretasi, dan respons terhadap perubahan kebutuhan maupun tuntutan yang dapat memengaruhi kinerja. Pengenalan dalam hal ini adalah angka kemiskinan yang tinggi sehingga dilakukan intervensi melalui dimensi pendidikan untuk meningkatkan partisipasi sekolah bagi peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu. Setelah diidentifikasi, dinas kemudian menginterpretasikan kebutuhan maupun kebijakan yang selaras dengan tuntutan yang ada di lapangan sehingga respons yang muncul adalah kegiatan beasiswa miskin yang didukung dengan ketersediaan anggaran. Pemberian beasiswa miskin untuk membeli perlengkapan peserta didik dilaksanakan untuk 2 sekolah tingkat SD dan 1 sekolah tingkat SMP. Kriteria pemberian beasiswa miskin ini adalah siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu yang kemudian diverifikasi oleh pihak sekolah dan belum pernah menerima beasiswa regular.

3.2 Efektivitas Belanja Urusan Kesehatan Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan di Kabupaten Manggarai Barat

Sesuai dengan indikator dari MPI dimana dimensi kesehatan yang terdiri atas imunisasi dan angka kematian bayi masuk dalam program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Imunisasi sendiri masuk dalam kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir dan pengelolaan

elayanan kesehatan balita dan untuk angka kematian bayi masuk dalam kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil, pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin, dan pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir. Berdasarkan penjabaran di atas, penulis ingin berfokus pada kegiatan pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat dimana ibu hamil maupun balita yang kurang mampu mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar melalui jaminan kesehatan masyarakat.

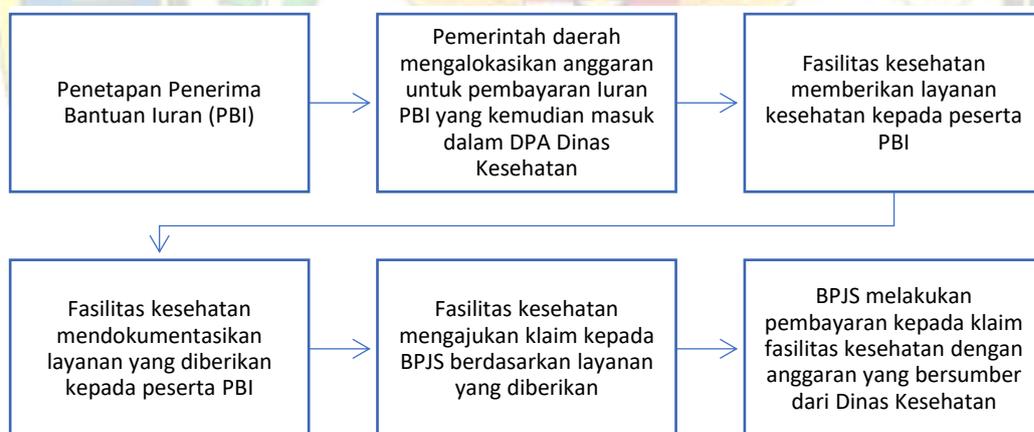
3.2.1 Pencapaian Tujuan

a. Tepat Sasaran

Terdapat 2 indikator yang melampaui target yaitu indikator pelayanan kesehatan balita sesuai standar sebesar 92% dan indikator ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan yaitu sebesar 91,34%. Selain itu, indikator bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir mencapai 87,04% dan telah mencapai target. Sedangkan untuk indikator ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil realisasi hanya sebesar 73,21% dari target sebesar 85%. persentase ibu hamil belum mencapai target yang telah ditetapkan karena kurangnya sosialisasi bagi ibu hamil terkait cakupan pelayanan yang masuk dalam BPJS sebagai jaminan kesehatan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

b. Tepat Waktu

Gambar 3.3
Diagram Alur Pembayaran Iuran PBI



Sumber: data diolah penulis, 2024

Pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan (faskes) diberikan kepada peserta PBI sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan kemudian dihitung pelayanan kesehatan yang telah diberikan setiap bulannya. Setelah itu, BPJS melakukan pembayaran kepada faskes dengan anggaran yang telah dicairkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat.

3.2.2 Integrasi

Gambar 3.4

Sebaran Penduduk Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial/Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

No	Kecamatan	Anggota Rumah Tangga (Jiwa)	Kepala Keluarga (KK)
1	Macang Pacar	13.903	3.985
2	Kuwus	11.817	3.290
3	Lembor	26.033	7.362
4	Sano Nggoang	12.308	3.645
5	Komodo	23.824	7.658
6	Boleng	15.296	4.641
7	Welak	18.087	4.788
8	Ndoso	17.579	4.758
9	Lembor Selatan	20.002	5.675
10	Mbeliling	9.910	2.936
11	Pacar	14.030	3.846
12	Kuwus Barat	9.706	2.542
TOTAL		192.498	55.129

Sumber: Bidang Perlindungan Sosial dan Korban Bencana Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai Barat, 2024

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2023 tercatat sebanyak 192.498 jiwa sedangkan jika dibandingkan dengan data PBI APBN jaminan kesehatan tercatat sebanyak 172.600 jiwa. DTKS ini bersifat fluktuatif tergantung dari perubahan yang terjadi di daerah sehingga berpengaruh juga terhadap kepesertaan PBI APBN. Untuk masyarakat kurang mampu yang tidak masuk dalam PBI APBN kemudian akan direkomendasikan oleh dinas sosial kepada dinas kesehatan untuk selanjutnya masuk kedalam PBI APBD dan di *cover* oleh pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat. Hal ini mengindikasikan adanya koordinasi antara dinas kesehatan dan dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terkait dengan validasi data untuk jaminan kesehatan yang masuk dalam kategori PBI APBN dan PBI APBD sehingga mendukung efektivitas belanja jaminan kesehatan untuk mengurangi angka kemiskinan dengan menekan biaya pengobatan masyarakat.

3.2.3 Adaptasi

Adaptasi melibatkan proses pengenalan, interpretasi, dan respons terhadap perubahan dalam kebutuhan, tuntutan, atau kondisi lingkungan yang dapat memengaruhi kinerja atau kelangsungan hidup organisasi.

Proses pengenalan adalah dimana instansi mengidentifikasi sasaran peserta jaminan kesehatan PBI serta mengidentifikasi ketersediaan sumber daya anggaran yang diperlukan untuk pelayanan kesehatan PBI. Tahapan interpretasi dimana membentuk kemitraan dengan berbagai sektor untuk memperkuat layanan kesehatan berupa cakupan jaminan kesehatan kepada peserta PBI dan terakhir adalah tahapan respons yang berarti pelaksanaan strategi yang telah dirumuskan.

Tabel 3.1

Cakupan Peserta BPJS PBI Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2023

Penerima Bantuan Iuran (PBI)	2021	2022	2023
PBI APBN	158.989	177.907	172.600
PBI APBD	41.573	42.250	50.450

Sumber: data diolah penulis, 2024

Cakupan PBI baik itu PBI APBN maupun PBI APBD mengalami fluktuatif dimana PBI APBN tahun 2021 berjumlah 158.989 peserta dan di tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 177.907 namun di tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 172.600. Secara bersamaan di tahun 2023 cakupan PBI APBD mengalami peningkatan dari yang sebelumnya berjumlah 41.573 di tahun 2021 dan 42.250 di tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa cakupan peserta PBI daerah berbanding lurus dengan ketersediaan anggaran dimana ketersediaan anggaran yang cukup akan mampu mengcover iuran PBI APBD yang akan berdampak pada pelayanan kesehatan yang layak bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat kurang mampu.

3.3 Efektivitas Belanja Urusan Sosial Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan di Kabupaten Manggarai Barat

3.3.1 Pencapaian Tujuan

- a. Tepat Sasaran

Tabel 3.2
Sebaran Penduduk DTKS Penerima PKH Tahun Anggaran 2023

No	Kecamatan	Anggota Rumah Tangga (Jiwa)	Kepala Keluarga (KK)
1	Macang Pacar	13.903	3.985
2	Kuwus	11.817	3.290
3	Lembor	26.033	7.362
4	Sano Nggoang	12.308	3.645
5	Komodo	23.824	7.658
6	Boleng	15.296	4.641
7	Welak	18.087	4.788
8	Ndoso	17.579	4.758
9	Lembor Selatan	20.002	5.675
10	Mbeliling	9.910	2.936
11	Pacar	14.030	3.846
12	Kuwus Barat	9.706	2.542
TOTAL		192.498	55.129

Sumber: Bidang Perlindungan Sosial dan Korban Bencana Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai Barat, 2024

Data penduduk Kabupaten Manggarai Barat yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial dan diupdate secara berkala untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan. Besaran bantuan PKH berbeda-beda tergantung pada komposisi dan kondisi keluarga. Bantuan ini diberikan setiap bulan atau setiap 3 bulan tergantung pada kebijakan pemerintah daerah setempat. Penyaluran bantuan PKH dari pemerintah pusat telah tepat sasaran sesuai dengan data yang terdaftar dalam DTKS.

b. Tepat Waktu

Penyaluran bantuan PKH dilaksanakan setiap 3 bulan sekali dan langsung disalurkan ke rekening penerima manfaat. Besaran uang yang diterima masyarakat melalui PKH bervariasi tergantung pada komponen bantuan. Komponen bantuan tetap untuk kategori sangat miskin sebesar Rp.900.000 per tahun dan kategori miskin sebesar Rp.500.000 per tahun. Sedangkan untuk kriteria dibagi atas ibu hamil sebesar Rp.3.000.000/tahun, anak usia dini Rp.3.000.000/tahun, anak SD Rp.900.000/tahun, lansia 70 tahun keatas Rp.2.400.000, dan penyandang disabilitas berat Rp.2.400.000/tahun. bantuan ini kemudian dihitung berdasarkan jumlah keluarga sesuai dengan kriteria dan disalurkan dalam empat tahap sepanjang tahun.

3.3.2 Integrasi

Adanya integrasi yang dibuktikan dengan koordinasi antara pihak dinas dengan desa atau kelurahan dalam pendataan DTKS. Penentuan data DTKS diawali dengan pendataan oleh aparat desa atau kelurahan yang dianggap perlu diusulkan untuk masuk dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Setelah itu, pihak desa atau kelurahan kemudian melakukan musyawarah untuk menetapkan keluarga yang masuk dalam DTKS dan akhirnya akan divalidasi kembali oleh pihak dinas melalui kegiatan monitoring dan evaluasi

3.3.3 Adaptasi

Belum merespons dengan baik terkait dengan penurunan angka kemiskinan dikarenakan belum adanya program inisiasi dari dinas dan kurangnya anggaran sehingga belum ada program langsung dari dinas terkait dengan upaya penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Manggarai Barat.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan penulis memiliki perbedaan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya dimana penelitian sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Septriani (2020), Riska Aini (2020) dan Sri Suartini & Hari Sulistiyo (2020) menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menekankan efektivitas belanja pada program yang berkaitan dengan penurunan kemiskinan dengan melihat pada indikator MPI serta pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari tiga urusan tersebut.

Efektivitas belanja urusan pendidikan dan kesehatan belum efektif karena belum tercapainya target dari kegiatan ataupun program yang berkaitan dengan penurunan kemiskinan. Selain itu, belanja urusan sosial hanya sebatas pada mendukung atau memfasilitasi kegiatan dari pusat dan belum ada inisiasi kegiatan yang berkaitan dengan penurunan kemiskinan yang didukung juga dengan kurangnya anggaran. Kurang validnya data kemiskinan PMKS dan DTKS di Kabupaten Manggarai Barat juga menjadi penghambat sehingga Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat didorong untuk melakukan kolaborasi serta pemanfaatan teknologi untuk melakukan validasi dan pemutakhiran data.

IV. KESIMPULAN

Sesuai dengan hasil analisis terhadap masalah yang terjadi di lapangan dengan metode penelitian yang penulis laksanakan, maka penulis simpulkan bahwa, Efektivitas belanja urusan pendidikan, kesehatan, dan sosial untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan: (1) Belanja urusan pendidikan belum efektif karena belum memenuhi indikator tepat sasaran dimana

realisasi kegiatan penyediaan biaya personil peserta didik PAUD dan kesetaraan belum mencapai target yang telah ditetapkan. (2) Belanja urusan kesehatan belum efektif karena belum memenuhi indikator tepat sasaran dimana realisasi ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil tidak sesuai target (3) Belanja urusan sosial belum efektif karena belum merespons dengan baik dimana hanya mengandalkan program dari pusat dan belum ada inisiasi program dari dinas sebagai upaya untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Manggarai Barat Terdapat hambatan yang ditemukan terkait efektivitas belanja urusan pendidikan, kesehatan, dan sosial untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Manggarai barat adalah kurang validnya data kemiskinan PMKS dan DTKS Kabupaten Manggarai Barat dan kurangnya sosialisasi. Terdapat upaya dilakukan terkait dengan hal ini yakni validasi dan pemutakhiran DTKS dan peningkatan sosialisasi terhadap masyarakat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni data yang bervariasi antara sumber yang berbeda.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan terkait belanja dan perkembangan belanja pada program yang berkaitan dengan kemiskinan serta menambahkan informan penduduk miskin agar mendukung efektifnya belanja yang dirasakan langsung masyarakat.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih terutama ditujukan kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai Barat, Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, dan Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membimbing, membantu, dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John W dan Creswell, J. D. 2018. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Fifth Edition*. Los Angeles: SAGE.
- Simangunsong, Fernandes. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintahan: Teoritik-Legalistik-Empirik-Inovatif*. Bandung: Alfabeta.
- Aini, R. (2020). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Universitas Diponegoro*, 8(2), 50–75.
- Alifa Ramadhani, A. (2023). *Pengeluaran Pemerintah dan Kemiskinan Multidimensi Indonesia Tahun 2018-2020* (Vol. 13, Issue 1).
- Atmawijaya, M. A., & Santoso, D. B. (2024). *ANALISIS PERAN BELANJA PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR TERHADAP PERCEPATAN PENURUNAN KEMISKINAN (Studi Kasus Terhadap 38 Kab/Kota Di Jawa Timur)*. 4(8).
- Carolina, Ma. (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Subsidi, Pendidikan, Dan Kesehatan, Terhadap Kemiskinan. *Jurnal Budget*, 7, 165–180.

- Kristiyanto, S., & Widodo, S. (2017). Analisis Efisiensi Belanja Langsung Dan Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Kota Di Jawa Timur Dalam Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 17(1), 1–12.
<https://jurnal.uns.ac.id/jiep/article/view/2310>
- Nourmanita, N. A. (2015). Belanja Publik (Expenditure Assignment) Antara Masalah Dan Efektivitas Anggaran Belanja. *Natapraja*, 4(1), 31–48.
<https://doi.org/10.21831/jnp.v4i1.12613>
- Pasaribu, Y. (2016). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Fungsi Pendidikan Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Infrastuktur Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2010-2013. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 2(1), 1–12.
- Putra, T. (2023). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pengentasan Kemiskinan Pada Provinsi Di Indonesia*. 2(4).
- Sandra, O. (2024). *PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DI SEKTOR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KOTA MAKASSAR*.
- Septriani. (2023). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 14(1), 41–51.
[doi./10.22373/jep.v14i1.779](https://doi.org/10.22373/jep.v14i1.779)
- Sigit, T. A., & Kosasih, A. (2020). Pengaruh Dana Desa terhadap Kemiskinan: Studi Tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 105–119.
<https://doi.org/10.33105/itrev.v5i2.170>
- Suartini, S. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kemiskinan: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. *Inovasi*, 17(2), 195–202.
<https://doi.org/10.33626/inovasi.v17i2.230>

